

Peran Mission for Migrant Workers (MFMW) dalam Advokasi Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran Filipina di Hong Kong

Agung Setiyo Wibowo¹

Abstract

Migration has attracted international concern for decades. It challenges receiving countries due to pressure to balance the need of domestic business and labor market, as well as the obligation to promote and protect the rights of migrant workers. The sending countries have also interest to balance the need of migrants and receiving countries. This research analyzes the role of Mission for Migrant Workers (MFMW)'s advocacy to protect the rights of Filipino migrants in Hong Kong. This paper concluded that the success of advocacy is strongly influenced by both domestic and transnational coalition.

Keywords: *Filipino migrant, Mission for Migrant Workers, transnational advocacy network, Hong Kong*

¹ Chairman Kampusgw.com & Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia. Untuk tujuan akademik penulis dapat dihubungi di grandsaint@gmail.com

Dinamika Buruh Migran Filipina

Migrasi didefinisikan sebagai gerakan seorang individu atau selompok orang dari satu wilayah ke wilayah lain melintasi batas administratif atau politik, dengan tujuan tinggal secara tetap atau sementara di tempat di luar mereka berasal. Definisi ini mencakup pergerakan pengungsi, *displaced persons*, migran gelap dan migran ekonomi. Menurut catatan Organisasi Migrasi Internasional, pada tahun 2008 saja tidak kurang dari 200 juta orang tinggal di luar negara kelahiran atau kebangsaannya.¹ Ketidakmerataan pembangunan ekonomi, sosial dan politik yang ditopang oleh meningkatnya kesalingterhubungan global semakin mendorong laju migrasi.

Migrasi buruh diartikan sebagai gerakan lintas batas untuk tujuan pekerjaan di luar negeri. Melalui jalur legal atau gelap, difasilitasi atau tidak, buruh migran

berkontribusi kepada negara asal maupun negara tujuan. Migran membantu memperluas angkatan kerja di negara tujuan dan melalui remitansi dapat berkontribusi terhadap pembangunan di negara asal. Pada November 2009 Bank Dunia melaporkan bahwa aliran remitansi yang tercatat ke negara-negara berkembang mencapai 338 Miliar Dolar AS pada tahun 2008.²

Di tengah arus globalisasi seperti sekarang ini hampir tidak ada negara yang tidak berhubungan dengan buruh migran, baik sebagai negara pengirim, negara transit, ataupun negara penerima. Tren peningkatan arus buruh migran terus terjadi di negara-negara pengirim seperti Indonesia, Filipina, India, Pakistan, Bangladesh, Kamboja dan Sri Lanka. Para buruh migran tersebut mendatangi negara-negara yang ekonominya relatif lebih makmur seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Malaysia, Taiwan,

¹ Labour Migration from Indonesia: An Overview of Indonesian Migration to Selected Destinations in Asia and the Middle East, (Jakarta: International Organization for Migration Mission in Indonesia, 2008), 3.

² *Ibid.*

Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar dan lain-lainnya.

Filipina ialah salah satu dari tiga negara di dunia yang perekonomiannya sangat bergantung kepada remitansi buruh migran. Walaupun migrasi buruh awalnya hanyalah salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan devisa, namun dewasa ini telah menjadi “industri ekspor buruh” yang sangat menguntungkan. Pemerintah Filipina memperkirakan tidak kurang dari 6,8 juta warganya bekerja di 191 negara per Desember 2003. Jumlah tersebut hampir mencakup 10 persen dari total populasi, dan 19,6 persen dari angkatan kerja.³ Dengan jumlah pengiriman buruh migran rata-rata 3.000 orang perhari, nilai remitansi terus meningkat dari 659 juta Dolar AS pada tahun 1984 menjadi 16

milyar Dolar AS sampai akhir tahun 2008.⁴

Sebagaimana buruh migran asal Indonesia, buruh migran Filipina bekerja di beragam sektor. Ada yang bekerja di sektor formal maupun informal. Ada yang masuk ke negara tujuan secara legal atau berdokumen, banyak pula yang tidak. Sebuah survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika Filipina melaporkan bahwa tidak kurang dari 2 juta buruh migran Filipina tidak berdokumen pada tahun 2008 saja. Sebagian besar buruh migran Filipina bekerja di sektor yang membutuhkan keterampilan rendah seperti pembantu rumah tangga (14,8 persen); pelayan, bartender dan pekerjaan terkait (4,1 persen); buruh cuci dan pekerjaan terkait (3,4 persen); perawat (3,4 persen); dan pengasuh (3,0 persen).⁵

³ Mary Lou L. Alcid, “Migrant Labour in Southeast Asia: Country Study: The Philippines” . *Friedrich Ebert Stiftung (FES) Project on Migrant Labor in Southeast Asia*. Dalam http://www.fes.de/aktuell/focus_interkulturelles/focus_1/documents/7.pdf (diakses pada 22 November 2014).

⁴ “Initial Statement of Migrant e International to the United Nations Committee on Migrant Workers”. Dalam http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/ngos/Migrante_Int_Philippines_10.pdf (diakses pada 22 November 2014).

⁵ “Philippine Overseas Employment Agency (POEA) 2007 data”, dalam <http://www.poea.gov.ph/stats/statistics.html> (diakses pada 22 November 2014).

Buruh migran telah menjadi andalan pemerintah Filipina dalam meraup devisa yang menunjang pembangunan ekonomi nasional. Seiring berjalannya waktu, terdapat banyak masalah yang menimpa buruh migran sebagaimana yang kerap dihadapi oleh buruh migran dari dan ke negara mana pun. Hak-hak dasar buruh migran seringkali tidak diakomodasi sebagaimana mestinya. Misalnya rekrutmen ilegal, perdagangan anak dan perempuan, lembur yang berlebihan, penghilangan hak cuti, pembayaran gaji yang tidak sesuai kontrak, dan beragam kekerasan fisik maupun mental.

Pelanggaran Hak-Hak Buruh Migran Filipina di Hong Kong

Hong Kong merupakan salah satu pusat keuangan utama di Asia selain Singapura. Sebagaimana fenomena yang terjadi di kota-kota besar dunia, ratusan ribu buruh migran memenuhi Hong Kong untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pada tahun 2006 terdapat lebih

dari 230.000 pembantu rumah tangga berkewarganegaraan asing di wilayah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok tersebut. Buruh migran Filipina dan Indonesia mendominasi dengan komposisi masing-masing 51,89 persen dan 44,73 persen.⁶

Arus buruh migran Filipina di Hong Kong mulai dapat dilacak sejak tahun 1970-an. Suatu periode ketika mayoritas buruh migran Filipina laki-laki bekerja di Timur Tengah dan buruh migran perempuan sebagai perawat bekerja di Amerika Serikat. Sampai saat ini Hong Kong merupakan salah satu tujuan paling menarik bagi buruh migran – khususnya pembantu rumah tangga – Filipina karena kedekatan geografis dan gaji minimum yang relatif lebih tinggi. Pada tahun 2007 saja, prosentase tertinggi dari pembantu rumah tangga asal Filipina menetapkan Hong Kong sebagai tujuan bekerja yaitu 46 persen. Hal ini membuat

⁶ Ma. Glenda Lopez Wui, *Transnational Activism for Migrant Workers: Examining the Struggles for Domestic Workers in Hong Kong*, (Singapore: National University of Singapore, 2012), 63.

buruh migran Filipina menjadi kelompok etnis minoritas terbesar di Hong Kong setelah etnis China.⁷

Organisasi Buruh Internasional mengakui bahwa pembantu rumah tangga merupakan sektor buruh migran yang paling rentan mendapatkan penyalahgunaan atau kekerasan. Hal ini tidaklah berlebihan karena tempat bekerja mereka merupakan rumah dari majikannya sehingga mudah sekali dituntut untuk bekerja dalam waktu yang sangat panjang. Mengingat pembantu rumah tangga bekerja dalam kendali pribadi majikan, beragam pelanggaran terhadap mereka sulit untuk dideteksi. Kontrak kerja mereka juga terikat oleh satu majikan dan tidak dideportasi jika majikan membatalkan izin kerja. Oleh karena itu, pembantu rumah tangga senantiasa mendapatkan kekerasan fisik, seksual maupun emosional.⁸ Berdasarkan hasil survey Mission for Migrant Workers tercatat bahwa 18 persen dari pembantu

rumah tangga berkewarganegaraan asing di Hong Kong mendapatkan penyalahgunaan atau kekerasan secara fisik.⁹

Sebagaimana laporan Amnesty International, buruh migran – khususnya pembantu rumah tangga – di Hong Kong menghadapi tekanan serius karena banyaknya pelanggaran atau penyalahgunaan dari majikan, tak terkecuali buruh migran asal Filipina. Beberapa penyalahgunaan yang paling sering terjadi antara lain. Pertama, dokumen pribadi diambil oleh majikan atau agen penempatan dan sekitar sepertiga di antaranya tidak diizinkan keluar dari rumah majikan. Kedua, rata-rata kerja 17 jam perhari dan tidak menerima gaji minum 4,010 Dolar Hong Kong sebagaimana diatur oleh *Standard Employment Contract* untuk pembantu rumah tangga asing. Ketiga, banyak yang secara fisik maupun verbal mendapatkan penyalahgunaan dari maji-

⁷ *Ibid*, hlm.64.

⁸ *Ibid*, hlm.101.

⁹ Massoud Hayoun, “Hong Kong protesters demand democracy, but not for their domestic workers”. *Al Jazeera*, September 30, 2014, dalam <http://america.aljazeera.com/articles/2014/9/30/occupy-central-domestic.html> (diakses pada 22 November 2014).

kan seperti pelarangan beribadah dan bekerja tujuh hari seminggu tanpa henti. Keempat, peraturan pemerintah Hongkong memperberat beban buruh migran. Misalnya, pembantu rumah tangga disyaratkan secara hukum untuk tinggal bersama majikan sebagai syarat untuk izin kerja, mencegah mereka untuk keluar dari rumah majikan bahkan ketika mereka dieksploitasi atau sedang dalam bahaya.¹⁰

Kerangka Pemikiran

Piper dan Uhlin mengartikan aktivisme sebagai sebuah kegiatan politik yang memiliki beberapa ciri: 1) berdasarkan sebuah konflik kepentingan dan dengan demikian bersifat mendebat; 2) menantang atau mendukung struktur *power* tertentu; 3) melibatkan aktor-aktor non-negara; dan 4) berada (setidaknya sebagian) di luar arena politik formal.¹¹

¹⁰ Ludovica Laccino, "Hong Kong: Hundreds of Domestic Workers Abused by Employers". *IB Times*, January 20, 2014, dalam <http://www.ibtimes.co.uk/hong-kong-hundreds-domestic-workers-abused-by-employers-1433081> (diakses pada 22 November 2014).

¹¹ Nicola Piper & Anders Uhlin, *Transnational Activism in Asia*, (New York: Routledge, 2003), 4.

Menurut Khagram dan Alvord gerakan sosial transnasional merupakan fenomena dan dinamika yang melintas, mengubah, melampaui dan bahkan mengubah perbatasan dan batas-batas. Dengan merujuk kegiatan sebagai transnasional, mereka memperbandingkan "jenis dominan yang seolah-olah dibatasi dan atau berbatasan unit, aktor, struktur, dan proses yang biasanya berkaitan dengan pengertian tentang bangsa, negara, negara-bangsa, dan sistem negara bangsa."¹²

Ada juga beberapa literatur aktivisme transnasional menguji jejaring atau organisasi yang memfasilitasi mobilisasi politik. Sebut saja Keck dan Sikkink¹³ yang berpendapat bahwa jejaring advokasi transnasional ialah aktor-aktor relevan yang bekerja secara internasional terhadap suatu isu, yang diikat bersama oleh nilai-nilai, wacana umum, dan pertukaran

¹² Sanjeev Khagram and Sarah Alvord, "The rise of civic transnationalism", dalam Srilatha Batliwala and L. David Brown (Eds). *Transnational Civil Society : An Introduction*, (Bloomfield, CT: Kumarian Press, 2006) , 66.

¹³ Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, (New York: Cornell University Press, 1998), 8.

informasi dan jasa yang padat. Sementara itu Tarrow memaknai aktivisme transnasional sebagai kelompok yang termobilisasi secara sosial dengan konstituen setidaknya di dua negara, terlibat dalam interaksi perdebatan berkelanjutan dengan pemegang *power* di setidaknya satu negara di luar tempat berpihak, atau melawan institusi internasional, atau sebuah aktor ekonomi multinasional.¹⁴

Isu buruh migran tidak dapat dilepaskan dari globalisasi. Oleh karena itu Falk mendefinisikan gerakan anti-globalisasi sebagai “globalisasi dari bawah” untuk melawan “globalisasi dari atas” yang berlebihan. Istilah yang terakhir merujuk meningkatnya kekuatan modal korporat melawan kekuatan setara, yang dicerminkan oleh dominasi perusahaan transnasional, keuangan global, dan menurunnya “negara yang penuh kasih” atau

rezim kesejahteraan. Tujuan “globalisasi dari bawah” menurut Falk ialah:¹⁵

The historic role of globalization-from-below is to transform the negative features of globalization-from-above, both by providing alternative ideological and political space to that currently occupied by market-oriented and statist outlooks and by offering resistances to the excesses and distortions that can be properly attributed to globalization in its current phase.

Dalam ekonomi global seperti sekarang ini, perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara-negara maju telah melampaui laki-laki yang bekerja di bangunan dan pertanian. Pekerjaan di sektor ini identik dengan rendahnya gaji, tiada keuntungan, panjangnya jam kerja, nihilnya keamanan dan kurangnya hak-hak di tempat kerja. Permasalahan migrasi seperti itu mendorong kelompok masyarakat sipil untuk

¹⁴ Sidney Tarrow, “Transnational Political Contention and Institutions in International Politics”, *American Review of Political Science* 4 (2001): 1-20.

¹⁵ Richard Falk, “the changing role of global civil society” dalam Gideon Baker dan David Chandler (eds), *Global Civil Society: Contested Futures*, (London and New York: Routledge, 2005), 125.

ambil bagian dalam aktivisme transnasional guna mengatasi rentannya buruh migran yang berketerampilan rendah.¹⁶

Menganalisis gerakan sosial dapat memahami lebih dalam bagaimana peran organisasi NGO dalam advokasi perlindungan hak-hak buruh migran di Hong Kong. NGO tidak lain adalah bagian dari sebuah gerakan sosial yang lebih besar dalam mengadvokasi kesejahteraan buruh migran. Goodwin dan Jasper mengartikan gerakan sosial sebagai “upaya sadar, terpadu dan berkelanjutan oleh orang-orang biasa untuk mengubah aspek masyarakat dengan menggunakan cara-cara ekstra-institusional. Mereka lebih sadar dan terorganisir dari mode ke mode. Mereka lebih bertahan dari protes tunggal atau kerusuhan.”¹⁷

Sementara itu Thomas Risse percaya bahwa dalam kondisi internasional yang serupa, perbedaan struktur domestik

menentukan variasi dalam pengaruh kebijakan aktor-aktor transnasional. Struktur domestik menengahi, menyaring, dan membiasakan upaya-upaya aktor dan aliansi transnasional dalam mempengaruhi kebijakan di beragam isu maupun area. Aktor-aktor transnasional harus menghadapi dua rintangan utama sebelum dapat mempengaruhi kebijakan. Pertama, mereka harus memperoleh akses terhadap sistem politik negara yang disasar. Kedua, mereka harus menghasilkan dan atau berkontribusi untuk ‘memenangkan’ koalisi kebijakan guna mengubah keputusan sesuai dengan arah yang diinginkan. Kemampuan mereka mempengaruhi perubahan kebijakan dipengaruhi oleh proses pembangunan koalisi domestik dalam jejaring kebijakan dan sejauh mana koalisi yang stabil berbagi faktor dalam aktor-aktor transnasional.¹⁸

Hak manusia atau yang lebih dikenal dengan HAM merupakan hak-hak

¹⁶ Nicola Piper, "Rights of Foreign Domestic Workers - Emergence of Transnational and Transregional Solidarity?", *Asian and Pacific Migration Journal* 14 (1-2) (2001): 97-119.

¹⁷ Jeff and James M. Jasper Goodwin, *The Social Movement Reader: Cases and Concept*, (Oxford: Blackwell Publishers, 2003), 3.

¹⁸ Thomas Risse, "Bringing Transnational Relations Back In: Introduction," dalam S. Khagram and P. Levitt (eds.), *The Transnational Studies Reader*, (New York: Routledge, 2008), 459-473.

dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan pijakan internasional untuk menentukan batasan-batasan HAM guna mewujudkan adanya kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Dalam deklarasi tersebut disebutkan bahwa seluruh umat manusia terlahir bebas, setara dan memiliki harga diri dan hak-hak individu yang berlaku bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang.¹⁹

Dalam konteks buruh migran, acuan yang digunakan sebagai standar internasional untuk perlindungan hak-hak buruh migran ialah *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 pada 18 Desember 1990.²⁰ Konvensi ini saling terkait dengan instrumen-instrumen lain

yang dikeluarkan oleh PBB seperti DUHAM; Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan budaya; Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Sosial; Konvensi Internasional tentang Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* yang dikeluarkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) ini memiliki sejumlah instrumen turunan yaitu:

1. Konvensi mengenai Migrasi untuk Bekerja (No.97),
2. Konvensi mengenai Migrasi Dalam Keadaan Teraniaya dan Pemajuan Kesempatan dan Perlakuan bagi Buruh Migran (No.143),
3. Rekomendasi mengenai Migrasi untuk Bekerja (No.86),

¹⁹ “The Universal Declaration of Human Rights”, dalam <http://www.un.org/en/documents/udhr/>, (diakses pada 18 Oktober 2014 pukul 15.45 WIB).

²⁰ “International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families”, dalam <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm>, (diakses pada 18 Oktober 2014 pukul 15.56 WIB).

4. Rekomendasi mengenai Buruh Migran (No.151), buruh migran mengembangkan kapabilitas untuk mengorganisir dan mengadvokasi.
5. Konvensi mengenai Kerja Wajib atau Kerja Paksa (No.159), dan
6. Konvensi mengenai Penghapusan Kerja Paksa (No.105).

Mission for Migrant Workers (MFMW) dan Advokasi Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran Filipina di Hong Kong

Banyaknya pelanggaran hak-hak buruh migran Filipina di Hong Kong mendorong lahirnya organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus terhadap advokasi perlindungan hak-hak buruh migran. Salah satunya ialah Mission for Migrant Workers (MFMW). NGO tersebut lahir dan berkembang dengan sejumlah faktor.²¹

1. Dapat mengontak langsung para buruh migran memberikan kesempatan mereka untuk melakukan konseling, bantuan hukum, tempat tinggal sementara, dan kemudian membantu

2. Dapat memobilisasi dukungan dari kelompok masyarakat sipil lokal, sehingga mampu memperkuat legitimasi advokasi.
3. Dapat mengadvokasi pemerintah Hong Kong secara langsung pada peraturan-peraturan terkait buruh migran.

The Mission for Migrant Worker (MFMW) didirikan pada 3 Maret 1981 untuk menanggapi banyaknya laporan penganiayaan dan eksploitasi buruh migran, khususnya pembantu rumah tangga Filipina di Hong Kong. Berdirinya MFMW tidak dapat dilepaskan oleh upaya Dewan Gereja Nasional di Filipina (NCCP), Resource Center for Philippine Concerns, Holy Carpenter Church, dan komite adhoc keagamaan dan awam dari gereja Katolik dan Protestan di Hong Kong. Berdirinya MFMW mencerminkan salah satu upaya rintisan kelompok agama berbasis di Filipina untuk menangani

²¹ Ma. Glenda Lopez Wui. *Loc.cit*, hlm. 79.

kebutuhan migran di luar negeri. Sebagai indikasi diakuinya keahlian dan karyanya, MFMW diundang untuk konsultasi oleh pemerintah Hong Kong dan konsulat di banyak negara tentang migrasi dan tema-tema terkait.²²

Selama bertahun-tahun, MFMW mengembangkan pendekatan Crisis Intervention and Prevention through Migrant Empowerment (CIPME) guna memandu layanan dan aktivitasnya Intervensi krisis menjawab kebutuhan mendesak buruh migran untuk konseling seputar keluhan kerja dan tempat tinggal. Selain itu, juga diberikan jasa pengacara pro-bono untuk membantu penyelesaian masalah hukum yang lebih kompleks.²³

MFMW juga memberikan perhatian kepada isu-isu yang terkait dengan globalisasi ekonomi neoliberal. Salah satunya dengan kampanye untuk mengkritik dampak negatif program-program Organisasi Perdagangan Dunia,

Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional yang memperparah kemiskinan di negara-negara pengirim buruh migran. Menurut MFMW, masuknya produk-produk pertanian dan barang dalam skala lebih besar karena imbas tarif yang lebih rendah dari Organisasi Perdagangan Dunia yang pada akhirnya merugikan kehidupan petani dan pekerja skala kecil.

NGO biasanya saling berkoalisi atau berjejaring dengan sesama NGO atau aktor lain sebagai upaya menyukseskan advokasinya. Hal ini juga dilakukan oleh MFMW dengan turut membantu mendirikan Asia Pacific Mission for Migrants (APMM) pada tahun 1984. Misi berdirinya organisasi ini ialah untuk menjangkau buruh migran dan kelompok masyarakat sipil yang peduli dengan isu buruh di luar Hong Kong. APMM merupakan sebuah pusat regional yang membantu pengembangan gerakan migran melalui beberapa strategi seperti advokasi dan kampanye, mengorganisir dan

²² "What is the Mission", dalam <http://www.migrants.net/what-is-the-mission/>, (diakses pada 23 November 2014).

²³ Ma. Glenda Lopez Wui. *Op.cit*, hlm. 104-109.

menghubungkan, membangun misi dan jejaring, riset dan pendidikan, serta program perempuan.²⁴ Organisasi ini juga berupaya mewujudkan sebuah gerakan migran di beragam negara di Asia Pasifik dan Timur Tengah dengan membangun koalisi atau jejaring dengan gerakan masyarakat sipil baik di negara asal migran maupun di negara migran bekerja.

Sebagai upaya dalam memberdayakan migran, MFMW terlibat dalam mengorganisir buruh migran. Salah satu caranya ialah dengan membangun United Filipinos in Hong Kong yang merupakan aliansi buruh migran pertama di Hong Kong. Organisasi yang berkomitmen untuk merangkul buruh migran Filipina ini telah memiliki setidaknya 22 organisasi, termasuk berjejaring dengan organisasi-organisasi migran dari negara lain.^{25,26} Pada tahun

2008 MFMW bersama dengan APMM juga membantu membentuk International Migrant Alliance (IMA) yang merupakan aliansi 112 organisasi migran dari berbagai belahan dunia.

Keberhasilan jejaring advokasi transnasional apapun ditentukan oleh pbingkaian isu yang digunakan (*issue framing*). Salah satu pbingkaian isu yang diterapkan MFMW ialah dengan wacana gereja atau keagamaan karena pemeluk agama tersebut berkewajiban melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, MFMW dan jejaringnya mengampanyekan bahwa melindungi hak-hak buruh migran bermuara pada ajaran agama Kristen dan semua manusia diberkati dengan persamaan derajat yang harus dihormati. Kewajiban umat Kristiani untuk membantu atau melindungi masyarakat yang kurang beruntung telah menjadi wacana nyata dalam pelembagaan

²⁴ "About Us", dalam <http://www.apmigrants.org/about-us>, (diakses pada 23 November 2014).

²⁵ Ma. Glenda Lopez Wui. *Op.cit*, hlm. 110.

²⁶ Beberapa organisasi yang dirangkul ialah Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) dan Asian Migrants Coordinating Board (AMCB).

AMCB sendiri merupakan koalisi organisasi migran akar rumput dari beragam negara seperti Unifil, ATKI, Filipino Migrant Workers Union (FMWU), Far East Overseas Nepalese Assosiation (Feona), Association of Sri Lankans in Hong Kong (ASL), dan Friends of Thai.

transnasional di antara gereja-gereja di Asia. Wacana ini juga diejawantahkan dengan dibentuknya Christian Conference of Asia pada tahun 1959 untuk Protestan dan Ortodoks, dan Federation of Asian Bishops Conference pada tahun 1972 untuk Katolik.²⁷

Upaya MFMW tidaklah sia-sia. MFMW berhasil menyukseskan protes atas Peraturan Pemerintah Filipina No.857 Tahun 1982 tentang buruh migran yang harus mengirimkan 50 persen pendapatannya melalui bank-bank Filipina.²⁸ Jika buruh migran gagal menunjukkan bukti remitansinya akan diberi sanksi dengan tidak ada perpanjangan paspor selama dua tahun. Akibatnya buruh migran tidak dapat memperbarui kontrak kerja tanpa validitas paspor. Menyikapi hal ini MFMW mengorganisir protes melawan Peraturan

Pemerintah dengan bergabungnya 11 organisasi buruh migran Filipina di Hong Kong membentuk United Filipinos Against Forced Remittance (UNFARE) yang kemudian diganti nama menjadi United Filipinos in Hong Kong (Unifil-HK).²⁹

Dalam protes tersebut para buruh migran diharuskan membuat petisi atau tanda tangan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah.³⁰ Dalam waktu dua bulan saja tidak kurang dari 6.000 tanda tangan telah terkumpul, padahal waktu itu buruh migran Filipina di Hong Kong berkisar antara 15.000 sampai 20.000 orang. Tanda tangan petisi kemudian diserahkan kepada perwakilan pemerintah Filipina di Hong Kong dan di pemerintah Filipina. Para buruh migran juga mengadakan wawancara media atau

²⁷ Lihat "Proceedings", dalam <http://www.daga.org.hk/press/urm/serving/proceedings.htm>, (diakses pada 26 November 2014).

²⁸ Ronalyn V. Olea, "Heroes of Filipino migrant workers honored," *Bulatbulat.com*, December 22, 2011, dalam <http://bulatlat.com/main/2011/12/22/heroes-of-filipino-migrant-workers-honored/>, (diakses pada 26 November 2014).

²⁹ Lihat "A Primer for the United Filipinos in Hong Kong (UNIFIL-HK)", dalam <http://www.unifil.org.hk/uniprimer.html>, (diakses pada 26 November 2014).

³⁰ "Bishop Fortich, On Migrants' Day, Suggests Hong Kong Domestic Unionize," dalam http://www.ucanews.com/story-archive/?post_name=/1989/11/14/bishop-fortich-on-migrants-day-suggests-hong-kong-domestics-unionize&post_id=38893, (diakses pada 26 November 2014).

konferensi pers dengan harapan protes mereka dikenal lebih luas.

Kesimpulan

Keberhasilan Mission for Migrant Workers (TF-AMW) dalam advokasi perlindungan hak-hak buruh migran Filipina di Hong Kong tidak dapat dilepaskan dari kuatnya koalisi di tingkat domestik dan transnasionalnya. Pembingkai isu hak-hak buruh migran dengan diskursus keagamaan yaitu dapat dikatakan tepat karena banyak organisasi keagamaan di Hong Kong maupun Filipina yang memperjuangkan isu ini, khususnya dalam konteks hak asasi manusia. Selain itu, pemanfaatan media juga dinilai ampuh untuk mengenalkan isu maupun advokasi di tingkat yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Falk, Richard. "the changing role of global civil society" dalam Gideon Baker dan David Chandler (eds). *Global Civil Society: Contested Futures*.

London and New York: Routledge, 2005.

Jeff and James M. Jasper Goodwin. *The Social Movement Reader: Cases and Concept*. Oxford: Blackwell Publishers, 2003.

Keck, Margaret E. & Kathryn Sikkink. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. New York: Cornell University Press, 1998.

Khagram, Sanjeev and Sarah Alvord. "The rise of civic transnationalism", dalam Srilatha Batliwala and L. David Brown (Eds). *Transnational Civil Society: An Introduction*. Bloomfield, CT: Kumarian Press, 2006.

Piper, Nicola & Anders Uhlin. *Transnational Activism in Asia*. New York: Routledge, 2003.

Piper, Nicola. "Rights of Foreign Domestic Workers - Emergence of Transnational and Transregional Solidarity?". *Asian and Pacific Migration Journal* 14 (1-2) (2001): 97-119.

Risse, Thomas. "Bringing Transnational Relations Back In: Introduction," dalam S. Khagram and P. Levitt (eds.). *The Transnational Studies Reader*. New York: Routledge, 2008.

- Tarrow, Sidney. "Transnational Political Contention and Institutions in International Politics". *American Review of Political Science* 4 (2001): 1-20.
- Wui, Ma. Glenda Lopez. *Transnational Activism for Migrant Workers: Examining the Struggles for Domestic Workers in Hong Kong*. Singapore: National University of Singapore, 2012.
- Labour Migration from Indonesia: An Overview of Indonesian Migration to Selected Destinations in Asia and the Middle East. Jakarta: International Organization for Migration Mission in Indonesia, 2008.
- Internet**
- Alcid, Mary Lou L, "Migrant Labour in Southeast Asia: Country Study: The Philippines" . *Friedrich Ebert Stiftung (FES) Project on Migrant Labor in Southeast Asia*. Dalam http://www.fes.de/aktuell/focus/interkulturelles/focus_1/documents/7.pdf (diakses pada 22 November 2014).
- "Initial Statement of Migrant e International to the United Nations Committee on Migrant Workers", dalam <http://www2.ohchr.org/english/bod> ies/cmw/docs/ngos/Migrante_Int_Philippines_10.pdf (diakses pada 22 November 2014).
- "Philippine Overseas Employment Agency (POEA) 2007 data", dalam <http://www.poea.gov.ph/stats/statistics.html> (diakses pada 22 November 2014).
- Hayoun, Massoud, "Hong Kong protesters demand democracy, but not for their domestic workers". *Al Jazeera*, September 30, 2014, dalam <http://america.aljazeera.com/articles/2014/9/30/occupy-central-domestic.html> (diakses pada 22 November 2014).
- Laccino, Ludovica, "Hong Kong: Hundreds of Domestic Workers Abused by Employers". *IB Times*, January 20, 2014, dalam <http://www.ibtimes.co.uk/hong-kong-hundreds-domestic-workers-abused-by-employers-1433081> (diakses pada 22 November 2014).
- "The Universal Declaration of Human Rights", dalam <http://www.un.org/en/documents/udhr/>, (diakses pada 18 Oktober 2014 pukul 15.45 WIB).
- "International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of

- Their Families”, dalam <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm>, (diakses pada 18 Oktober 2014 pukul 15.56 WIB).
- “What is the Mission”, dalam <http://www.migrants.net/what-is-the-mission/>, (diakses pada 23 November 2014).
- “About Us”, dalam <http://www.apmigrants.org/about-us>, (diakses pada 23 November 2014).
- “Proceedings”, dalam <http://www.daga.org.hk/press/urm/serving/proceedings.htm>, (diakses pada 26 November 2014).
- Olea, Ronalyn V, ”Heroes of Filipino migrant workers honored,” *Bulatbulat.com*, December 22, 2011, dalam <http://bulatlat.com/main/2011/12/22/heroes-of-filipino-migrant-workers-honored/>, (diakses pada 26 November 2014).
- “A Primer for the United Filipinos in Hong Kong (UNIFIL-HK)”, dalam <http://www.unifil.org.hk/uniprimer.html>, (diakses pada 26 November 2014).
- “Bishop Fortich, On Migrants’ Day, Suggests Hong Kong Domestic Unionize,” dalam http://www.ucanews.com/story-archive/?post_name=/1989/11/14/bishop-fortich-on-migrants-day-suggests-hong-kong-domestics-unionize&post_id=38893, (diakses pada 26 November 2014).